

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN BONTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SALAYAR

Murshal Manaf
Staf Pengajar Jurusan Teknik PWK, Universitas 45 Makassar
Murshal_manaf@yahoo.com

ABSTRAK

*Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah judul yang saya angkat dalam skripsi ini. Studi tentang pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan masalah di kawasan pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengembangan beberapa sektor yang merupakan potensi utama untuk dikembangkan, yaitu dari segi perikanan dan kelautan maupun pariwisata. Kajian ini meliputi pola pemanfaatan ruang. Dari hal tersebut dapat dilihat dimana yang termasuk kawasan budidaya atau non budidaya Kecamatan Bontoharu. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Sehingga di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan potensi yang ada.*

Kata Kunci : *Overfishing, Budidaya, wilayah pesisir*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sejalan dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa perencanaan tata ruang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Sehingga nantinya dengan adanya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi.

Kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Wilayah pesisirnya juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi wilayah pesisir belum dioptimalkan.

Belum optimalnya sektor perikanan disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh para pengusaha di bidang perikanan. Di samping itu lemahnya penegakan hukum dan minimnya kerja sama antar daerah dan propinsi yang saling menguatkan mendorong

terjadinya penurunan produksi dari waktu ke waktu jika penangkapan secara ilegal masih terus terjadi.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang di utamakan pengembangannya yaitu Kecamatan Bontoharu yang terletak setelah ibu kota kabupaten yaitu kota Benteng. Di kecamatan ini sudah terletak Bandara H. Aroepala Selayar sebagai transportasi udara satu-satunya di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akses dengan daerah lain lebih mudah dan lokasinya cukup dikenal.

Dalam surah An-Nahl dijelaskan bahwa hasil laut yang ada ikan-ikan, mutiara merupakan potensi alam yang diberikan Allah S.W.T untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup kita. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur dan tidak merusak pemberian Allah tersebut melainkan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan fakta tersebut, Kecamatan Bontoharu memiliki daya tarik untuk pengembangan berbagai aktifitas dan pengelolaan yang lebih untuk mencapai pembangunan Kecamatan Bontoharu secara berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan dan sumberdaya di dalamnya, maka diperlukan pengelolaan secara terpadu.

Dengan mencari tahu kebenaran akan isu permasalahan yang ada di sebutkan di atas dan lebih menguatkan keberadaan sektor-sektor apa saja yang menjadi potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan Kecamatan Bontoharu yang demikian besar secara optimal dan berkesinambungan, dibutuhkan data aktual tentang potensi dan kondisi sumberdaya ekosistem pesisir serta pengkajian pola-pola pemanfaatannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan permasalahan wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Bontoharu dan mengetahui arahan zonasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Bontoharu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil.

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pembangunan sektor kelautan tidak dapat dilepaskan dari makna Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang pokok perairan Indonesia juncto Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. dalam undang-undang tersebut ditetapkan konsep Wawasan Nusantara yang menjadi dasar bagi penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia.

Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta lautan yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Sesuai dengan konsep wawasan nusantara

tersebut, laut wilayah Indonesia adalah laut teritorial selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik pangkal terluar dari pulau terluar di wilayah kepulauan Indonesia.

Perda tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

3. Tata Ruang Kawasan Pantai

Fungsi tata ruang kawasan pantai adalah merupakan suatu usaha/upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi daripada kawasan pantai yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendaliannya.

Setiap usaha pengelolaan wilayah pesisir, sebelumnya diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumber daya alam. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses persiapan pembuatan keputusan untuk pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

4. Zonasi Wilayah Pesisir

Batas Wilayah Rencana Zonasi Pesisir Kawasan Rencana Zonasi mencakup semua wilayah kecamatan di pesisir dan saluran air yang ditemukan di wilayah perencanaan. Secara spesifik, batas wilayah daratan untuk Rencana Zonasi ditetapkan sama dengan batas administrasi kecamatan, dan batas kearah laut sampai 4 mill laut pada tingkat pemerintahan kabupaten dan sampai 12 mill laut untuk tingkat propinsi.

Menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung

serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Zona inti yang antara lain diperuntukkan:
 - a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. Perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. Perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. Penelitian; dan/atau
 - e. Pendidikan.
2. Zona pemanfaatan terbatas antara lain diperuntukkan:
 - a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. Pariwisata dan rekreasi;
 - c. Penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. Pendidikan.
3. Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. Yaitu merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitas

C. METODE ANALISIS DATA

Jenis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu sifatnya *deskriptif kualitatif* atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey.

Sampel penduduk yang digunakan dalam penelitian ini meliputi setiap kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bontoharu berdasarkan dari data masyarakat yang menetap di Kecamatan Bontoharu sehingga (N) = 12.586 jiwa. Jika nilai kritis atau batas ketelitian yang di inginkan sebesar 10% maka jumlah responden dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{12.586}{12.586(0,1)^2+1}$$

= 99,21 atau 100 responden

Jumlah kelurahan untuk tiap kelurahan Bontoborusu yang ada di Kecamatan Bontoharu adalah $(1.470/12.586) \times 100 = 11$ responden. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Sampel tiap Kelurahan di Kecamatan Bontoharu

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Sampel
1	Bontoborusu	1.470	12
2	Bontolebang	810	6
3	Bontosunggu	1.740	14
4	Bontobangun	2.188	17
5	Putabangun	1.723	14
6	Bontotangga	1.373	11
7	Kahu-Kahu	1.787	14
8	Kalepadang	1.495	12
Jumlah		12.586	100

Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif-Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif data pada penelitian ini dengan cara; menghitung nilai rata-rata jawaban responden yang telah dikuantitatifkan. Hasil yang telah diperoleh pada tahap I didistribusikan ke dalam tabel silang (*crosstab*) yang menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan arah dan tujuan pengembangan analisis.

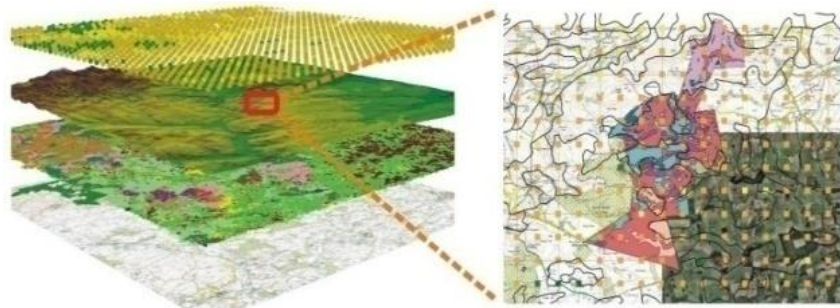
Data yang terjaring melalui hasil questioner, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Crosstabulation*). Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu berkembang, kurang berkembang, dan tidak berkembang. Penentuan kategorisasi didasarkan pada:

Tabel 2. Kategorisasi dengan Skala Likert

No	Skala Likert	Persentase (%)	Nilai Bobot
1	Berkembang	70>	3
2	Kurang Berkembang	40-70	2
3	Tidak Berkembang	< 40	1

2. Analisis Kesesuaian Lahan dengan Superimpose (*Overlay*) / *Spatial Analysis*.

Analisis ini merupakan proses tumpang susun atau overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik yang kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Dengan *overlay* peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta daya dukung fisik dan lingkungan untuk pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.



Gambar 1. Skema Overlay Peta

Sumber: ArcGIS 9.2 Help

Pada gambar terlihat bahwa terdapat empat *layer* data tematik yang *dioverlay* yang untuk kemudian menghasilkan satu *layer* tematik baru hasil kombinasi dari keempat *layer* masukan. Dari analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang dalam bentuk peta pemanfaatan ruang yang meliputi kesesuaian untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tabel 3. Kriteria Penentuan Kawasan

Penentuan Kawasan	Kriteria
Kawasan Hutan Lindung	Skor 175 & > 175
Kawasan Penyangga	Skor 125 - 174
Kawasan Budidaya	Skor < 124

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bontoharu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara geografis terletak dalam posisi koordinat 6°05'-6°13'LS dan antara 120°25'-120°35'BT

Penggunaan lahan pada kawasan penelitian masih didominasi oleh penggunaan lahan berupa perkebunan dan hutan rakyat serta penggunaan tanah lainnya dalam perkembangan lima tahun terakhir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Penggunaan Lahan Kecamatan Bontoharu

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	304,17	2,52
2	Kebun Campuran	2.596,48	21,53
3	Tegalan	2.366,98	19,62
4	Perkebunan	2.699,15	22,38
5	Rawa	17,75	0,14
6	Tambak	231,56	1,92
7	Hutan	2.622,27	21,74
8	Semak Belukar	1.220,55	10,12
Total		12.058,91	100

1. Analisis Potensi dan Permasalahan

Suatu pemanfaatan ruang membutuhkan potensi untuk berkembang. Namun dalam perkembangannya bukan tidak mungkin akan terjadi konflik yang menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatannya, sehingga diperlukan peninjauan ulang mengenai hal tersebut agar dapat diarahkan sesuai dengan fungsi ruangnya.

Begitupun yang terjadi pada Kecamatan Bontoharu, Untuk mengetahui potensi dan isu mengenai pemanfaatan ruangnya dilakukan pengambilan data sekunder dan survey langsung tentang sektor-sektor yang ada pada kawasan tersebut. Sektor-sektor tersebut antara lain:

- a. Pertanian dan Perkebunan

Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Bontoharu

Penilaian Responden	Identitas Responden				Jumlah	
	1		2		F	%
	F	%	F	%		
Berkembang	16	40	-	-	16	40
Kurang Berkembang	20	50	-	-	20	50
Tidak Berkembang	4	10	-	-	4	10
Jumlah	40	100	-	-	40	100

Keterangan : 1. Pemerintah 2. Masyarakat dan Swasta

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa 40% responden menjawab berkembang dan 50% menjawab kurang berkembang serta 10% menjawab tidak berkembang. Dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian sudah dikembangkan namun masih kurang berkembang. Dari hasil wawancara langsung dan alasan-alasan pemilihan jawaban pada kuisisioner tersebut dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada, kurang berkembangnya sektor pertanian disebabkan antara lain :

- 1) Etos kerja petani yang masih kurang.
 - 2) Tingginya biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi, terutama untuk perkebunan yang di kembangkan di Desa Bontolebang, Desa Kahu-kahu dan Desa Bontoborusu yang wilayahnya terpisah dari pulau selayar.
 - 3) Belum adanya Agroindustri sebagai pengelolaan hasil perkebunan yang ada baik di Kec. Bontoharu sendiri maupun Kec. Benteng sebagai pusat pelayanan pada Kab. Selayar, sehingga dalam pemasaran hasil produksi perkebunan masih belum maksimal serta peningkatan terhadap hasil produksi pun masih terbatas.
- b. Pariwisata

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Sektor Pariwisata di Kecamatan Bontoharu

Penilaian Responden	Identitas Responden				Jumlah	
	1		2		F	%
	F	%	F	%		
Berkembang	10	25	40	66,7	50	50
Kurang Berkembang	22	55	18	30	40	40
Tidak Berkembang	8	20	2	3,3	10	10
Jumlah	40	100	60	100	100	100

Keterangan : 1. Pemerintah 2. Masyarakat dan Swasta

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa 50% responden menjawab berkembang dan 40% menjawab kurang berkembang serta 10% menjawab tidak berkembang. Dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata sudah berkembang. Hasil wawancara langsung dan pertanyaan esai pada kuisisioner, sektor pariwisata berkembang namun ada beberapa masalah pengelolaan yang terjadi disebabkan antara lain :

- 1) Rendahnya tingkat aksesibilitas menuju ke lokasi wisata khususnya untuk wisata bahari dimana harus menggunakan jolore untuk menjangkau daerah wisata tersebut.
- 2) Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan pariwisata.
- 3) Situs-situs sejarah yang masih dikelola secara individu.
- 4) Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai.

c. Perikanan

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Sektor Perikanan di Kecamatan Bontoharu

Penilaian Responden	Identitas Responden				Jumlah	
	1		2		F	%
	F	%	F	%		
Berkembang	13	32,5	13	21,7	26	26
Kurang Berkembang	23	57,5	31	51,7	54	54
Tidak Berkembang	4	10	16	26,6	20	20
Jumlah	40	100	60	100	100	100

Keterangan : 1. Pemerintah 2. Masyarakat dan Swasta

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa 26% responden menjawab berkembang dan 54% menjawab kurang berkembang serta 20% menjawab tidak berkembang. Dapat

disimpulkan bahwa sektor perikanan sudah dikembangkan namun masih kurang berkembang. Hasil wawancara langsung dan pertanyaan esai pada kuisisioner, kurang berkembangnya sektor perikanan disebabkan antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang digunakan masih bersifat tradisional dimana masyarakat masih menggunakan kapal joloro dengan menggunakan jaring dan pegeboman.
- 2) Pada Desa Puttabanguna pembudidayaan ikan masih sulit di kembangkan di karenakan kondisi topografi yang relative terjal terutama pada bagian tepi pantai.

Dari nilai-nilai yang di dapat berdasarkan hasil kuisisioner dapat menguatkan sektor-sektor tersebut sebagai potensi yang terdapat di Kecamatan Bontoharu dan dapat ditemukan permasalahan-permasalahan dari alasan pemilihan jawaban. Selain itu dapat ditemukan potensi dan permasalahan lain dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat.

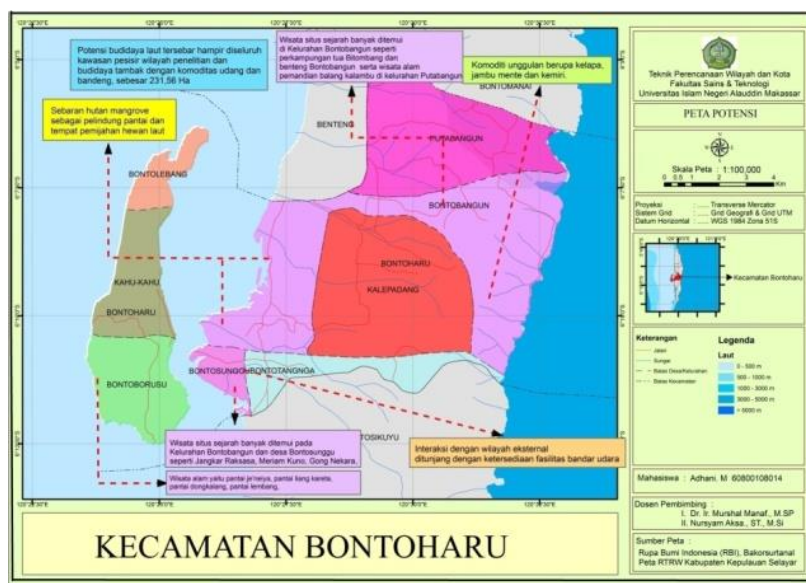
Antara lain potensi peternakan dan tidak melupakan akan potensi kebencanaan sebagai wilayah pesisir yang rawan akan bencana. Salah satu permasalahan yang sangat sering dibicarakan oleh warga masyarakat Kecamatan Bontoharu yaitu mengenai pembangunan perumahan pemukiman pada yang masih banyak terbangun pada kawasan sempadan pantai dan berkembang tidak beraturan.

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Sektor Perikanan

No.	Sektor-sektor pembangunan di Kecamatan Bontoharu	Nilai hasil Crosstab (%)	Standar Nilai Pengaruh	Nilai Bobot	Kesimpulan
1.	Pertanian dan Perkebunan	50	40-70	2	Kurang Berkembang
2.	Pariwisata	50	40-70	2	Kurang Berkembang
3.	Perikanan	54	40-70	2	Kurang Berkembang

Sumber : Hasil Analisis 2012

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi sektor-sektor pemanfaatan ruang yang berpengaruh terhadap pembangunan Kecamatan Bontoharu belum ada yang berkembang secara optimal. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi dan permasalahan di Kecamatan Bontoharu dapat dilihat pada gambar 2 Peta Potensi dan gambar 3 Peta Permasalahan di Kecamatan Bontoharu sebagai berikut.



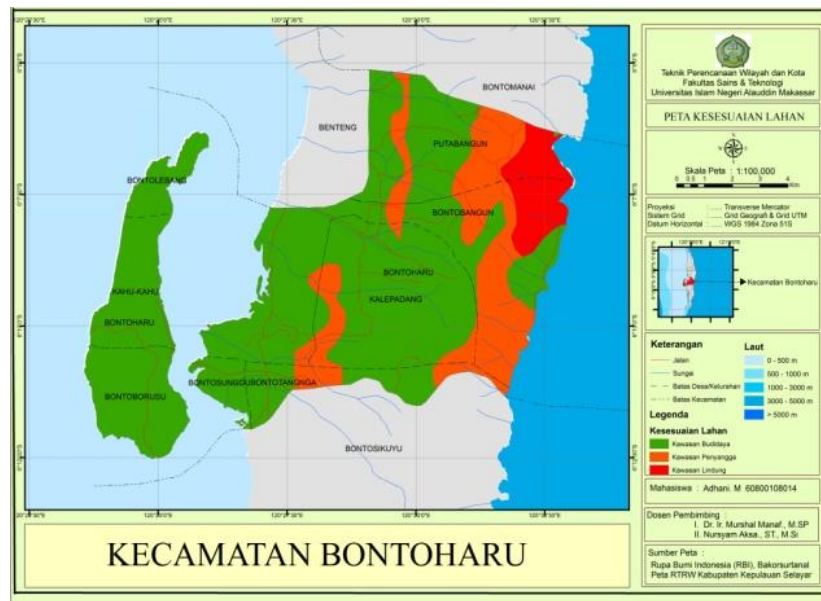
Gambar 2. Peta Potensi di Kecamatan Bontoharu

2. Arahkan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Bontoharu

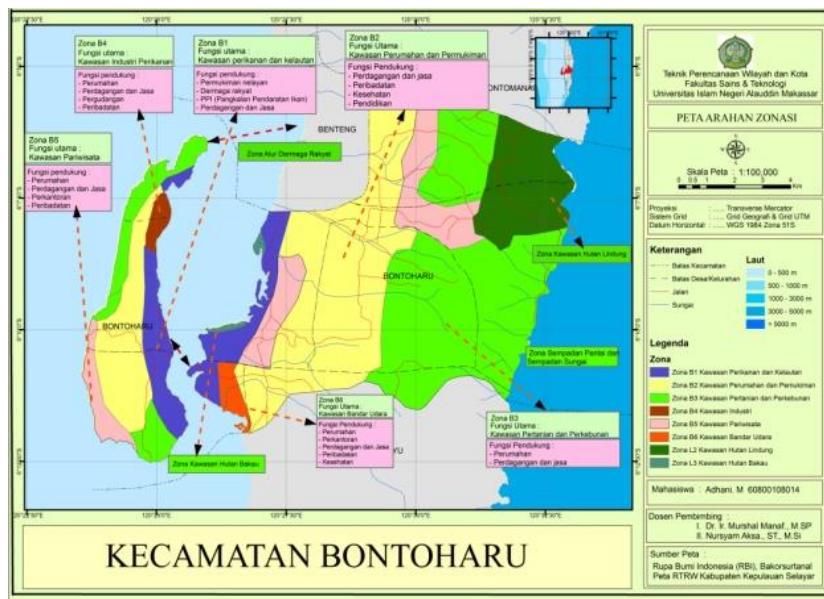
Dari hasil analisis superimpose kesesuaian lahan yang menghasilkan kawasan budidaya, kawasan penyangga, kawasan lindung dan juga melihat potensi dan permasalahan yang ada, arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kecamatan Bontoharu dibagi kedalam zona pengembangan yaitu:

- a. Zona pemanfaatan umum diarahkan terdiri dari enam sub zona dan dialokasikan sesuai peruntukannya dan berdasarkan potensi dan kondisi sumberdaya yang tersedia.
 - 1) Zona B1
Dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan dan kelautan di arahkan pengembangannya menuju kawasan strategis minapolitan.
 - 2) Zona B2
Dengan fungsi utama sebagai kawasan Perumahan dan Permukiman dengan arahan pengembangannya menata kembali pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah pesisir demi terwujudnya konsep berwawasan lingkungan
 - 3) Zona B3
Dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, maka arahan pengembangannya berdasarkan konsepsi yaitu mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan yang merupakan komoditi unggulan.
 - 4) Zona B4
Dengan fungsi utama sebagai kawasan industri perikanan dapat dirahakan ke pengembangan industri pengolahan hasil perikanan antara lain industri pengolahan ikan.
 - 5) Zona B5
Berfungsi sebagai kawasan pariwisata dengan arahan berdasarkan konsepsi yaitu pengembangan pariwisata berbasis pendidikan dan kebudayaan.
 - 6) Zona B6
Berfungsi sebagai kawasan bandar udara H. Aroeppala diharapkan tidak hanya dapat melayani dua rute namun ada penambahan beberapa rute ke depannya.
- b. Zona Konservasi diarahkan terdiri dari tiga sub zona yaitu
 - 1) Zona sempadan pantai berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 diusulkan seluas kurang lebih 100 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi.
 - 2) Zona hutan bakau dimana kawasan ini bertujuan untuk melindungi tanaman lingkungan pesisir dan lautan dalam rangka mencegah terjadinya abrasi pantai, banjir, instrusi air laut, usaha budidaya dibelakangnya, pelestarian flora dan fauna serta tempat mencari makan berbagai biota perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Zona hutan Lindung. Pengembangan kawasan lindung untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau.
- c. Zona Alur diarahkan kedalam 1 sub zona yaitu zona alur pelayaran ke pulau pasi dengan dua alur yaitu alur pelayaran langsung ke Kota Benteng dan alur pelayaran

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis kesesuaian lahan di Kecamatan Bontoharu dapat dilihat pada gambar 4 dan untuk peta arahan zonasi dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut.



Gambar 4. Peta Analisis Kesesuaian Lahan



Gambar 5. Peta Arahan Zonasi

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Dari hasil analisis potensi dan permasalahan melalui penilaian responden maka di dapatkan sektor-sektor yang merupakan potensi untuk dikembangkan dan permasalahan dalam pengembangannya antara lain sebagai berikut:
 - a) Potensi
 - 1) Pertanian dan Perkebunan merupakan sektor yang dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu dengan komoditi unggulan berupa kelapa, jambu mente dan kemiri.

- 2) Pariwisata merupakan sektor yang tersebar hampir di semua wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu dengan wisata situs sejarah yang banyak ditemui seperti Jangkar Raksasa, Meriam Kuno, Gong Nekara, Perkampungan Tua Bitombang, makam We Tinri Dio, dan Benteng Bontobangun.
 - 3) Perikanan merupakan sektor yang terdapat di hampir semua wilayah administrasi terkecuali pada Desa Putabangun. Dan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan sebagai kawasan strategis minapolitan.
- b) Permasalahan
- 1) Etos kerja masyarakat yang masih kurang.
 - 2) Tingginya biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi, terutama untuk perkebunan yang di kembangkan di Desa Bontolebang, Desa Kahu-kahu dan Desa Bontoborusu yang wilayahnya terpisah dari pulau selayar.
 - 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sektor-sektor yang ada.
 - 4) Teknik penangkapan ikan yang digunakan masih bersifat tradisional dimana masyarakat masih menggunakan kapal joloro dengan menggunakan jaring.
2. Dari hasil analisis superimpose kesesuaian lahan yang menghasilkan kawasan budidaya, kawasan penyangga, kawasan lindung dan juga melihat potensi dan permasalahan yang ada, arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kecamatan Bontoharu dibagi kedalam zona pengembangan yaitu:
- a. Zona pemanfaatan umum diarahkan terdiri dari enam zona dan dialokasikan sesuai peruntukannya dan berdasarkan potensi dan kondisi sumberdaya yang tersedia.
 - 1) Zona B1
Dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan dan kelautan di arahkan pengembangannya menuju kawasan strategis minapolitan.
 - 2) Zona B2
Dengan fungsi utama sebagai kawasan Perumahan dan Permukiman dengan arahan pengembangannya menata kembali pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah pesisir demi terwujudnya konsep berwawasan lingkungan
 - 3) Zona B3
Dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian dan perkebunan, maka arahan pengembangannya berdasarkan konsepsi yaitu mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan yang merupakan komoditi unggulan.
 - 4) Zona B4
Dengan fungsi utama sebagai kawasan industri perikanan dapat dirahakan ke pengembangan industri pengolahan hasil perikanan antara lain industri pengolahan ikan.
 - 5) Zona B5
Befungsi sebagai kawasan pariwisata dengan arahan berdasarkan konsepsi yaitu pengembangan pariwisata berbasis pendidikan dan kebudayaan.
 - 6) Zona B6
Befungsi sebagai kawasan bandar udara H. Aroepala diharapkan tidak hanya dapat melayani dua rute namun ada penambahan beberapa rute ke depannya.
 - b. Zona Konservasi diarahkan terdiri dari tiga sub zona yaitu :
 - 1) Zona sempadan pantai berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 diusulkan seluas kurang lebih 100 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi.

- 2) Zona hutan bakau dimana kawasan ini bertujuan untuk melindungi tanaman lingkungan pesisir dan lautan dalam rangka mencegah terjadinya abrasi pantai, banjir, intrusi air laut, usaha budidaya dibelakangnya, pelestarian flora dan fauna serta tempat mencari makan berbagai biota perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Zona hutan Lindung. Pengembangan kawasan lindung untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau.
3. Zona Alur diarahkan kedalam 1 sub zona yaitu zona alur pelayaran ke pulau pasi dengan dua alur yaitu alur pelayaran langsung ke Kota Benteng dan alur pelayaran ke Desa Bontosunggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kodoatie, Robert J & Sjarief Roestam, 2010. Tata Ruang Air. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2010. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah-Cipta Karya, Pusat Studi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1992. Laporan Akhir Studi Tipologi Kabupaten.
- Permen 17 Tahun 2008. Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Salayar Tahun 2010-2030.